

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdurahman. 1983. *Beberapa Aspek Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.

A.P. Parlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II -Sertifikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Amin, R. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Bachtiar Effendi. 1983. *Pendaftaran di Indonesia dan Peraturan Pelaksanannya*. Bandung: Alumni.

Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid i*. Jakarta: Djambatan

Djulaeka & Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Effendi Perangin. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Padang Praktisi Hukum)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Elza Syarief. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Elza Syarief. 2014. *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

H. Suryanto. 2020. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.

Hanafi. 2016. *Hukum Agraria Diktat Hukum Agraria*. Pamekasan Jawa Timur: Duta Media Publishing.

Harahap Yahya M, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Irianto & Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Muh. Fitrah & Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak.

Mukhtazar. 2020. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media.

R. Soebekti. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Soeroso. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, HIR, R.Bg., dan Yurisprudensi. 2011. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II.

Sri Hajati. 2018. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Umrati & Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta Timur: Kencana

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta Timur: Kencana.

Z.A. Sangadji. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Zairin Harahap. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

Achmad Sriyanti. *Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan MA NO. 987 K/PDT/2004)*, (Tesis Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008).

Afriani Bela. *Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Antara Sertipikat Hak Milik (SHM) Dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Kota Pangkalpinang*, (Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2018).

Bambang Hartono dkk. *Pranata Hukum*. (Jurnal Ilmu Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Vol 10, No 1, 2015).

Farizky Havidz. *Faktor-Faktor Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Sukoharjo*, (Skripsi Sarjana Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018).

Jauhari Eko. *Peranan BPN Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Bersifat Declaratoir (Studi Kasus Putusan PN Semarang Nomor*

102/Pdt.G/2004.PN.Smg), (Tesis Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2011).

Nurjannah, T. *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*, (Jurnal Tomalebbi, III (2), 2016).

Parsaulian, Anggiat Perdamean. *Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan Nomor: 24/G/PTUN.BJM)*, (BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019).

Persaulian Sudjito, A. P. A. *'Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM)'*, (BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) 2019.

Putra, F. M. K. *Tanggung Gugat Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Bentuk Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah*. (Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol 26, No 2, 2017).

Sartika, M. *Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*. (Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol 2, No 1, 2019).

Simanjuntak Enrico. *Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, (BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019).

Tyas Widya Ayuning. *Pembatalan Hasil Pengukuran Bidang Tanah Objek Eksekusi Perkara NO.24/EKS/2007/PN.Ska. Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.07/G/2009.PTUN.SMG)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012).

C. Artikel

Baril Basith Abdil. *Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim di*
Pa-talu.go.id.

Jam'an Abi. *Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di*
hukumonline.com.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.